

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di Indonesia saat ini dapat disebut cukup berkembang, ini juga memengaruhi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang juga berkembang dalam segi keuangan maupun kinerja lembaga. Kebanyakan dari lembaga yang bersangkutan hanya fokus pada bank syariah tanpa memperdulikan lembaga keuangan lain yang juga berpengaruh untuk masyarakat dan perekonomian menengah dan kebawah yang ada di Indonesia.

Lembaga mikro syariah tentu berpengaruh dalam membangun perekonomian yang ada. Keberadaannya tentu sangat berpengaruh dalam membantu membangun perekonomian dan diharapkan dapat memberikan solusi masalah perekonomian yang tengah menjadi keluhan dari para pelaku usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa LKMS adalah harapan bagi masyarakat terhadap permasalahan baik secara modal atau hal lain yang tengah dihadapi oleh pelaku ekonomi.

Tujuan didirikannya LKMS adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada pengusaha mikro berupa pinjaman dana atau pembiayaan kepada anggota, pengelolaan simpanan dana dan menawarkan jasa konsultasi kepada para pelaku usaha mikro. Salah satu LKMS yang ada di Indonesia adalah Koperasi Syariah.

Pekembangan Koperasi Syariah saat ini dapat dikatakan cukup pesat dalam mengembangkan usahanya serta memenuhi kebutuhan anggotanya. Kondisi ini

dapat di dilihat dari jumlah koperasi yang berdiri di seluruh Indonesia. Saat ini jumlah Koperasi di Indonesia sekitar 150.223 unit koperasi dan tercatat dari angka tersebut 1,5% adalah bagian dari Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan berbasis Syariah (KSPPS). Dari data tersebut tercatat 2.253 unit KSPSS di Indonesia dengan anggota berjumlah 1,4 juta orang.

Seperti Perbankan syariah, Koperasi Syariah juga memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang dapat dilakukan koperasi syariah adalah dengan mengumpulkan serta memberikan saluran dana kepada anggota koperasi. Dalam praktik memberikan penyaluran dana pembiayaan koperasi syariah tidak selalu berjalan lancar. Terkadang dalam proses pembiayaan anggota terjadi pembiayaan bermasalah atau biasa disebut kredit macet. Kasus macetnya pembiayaan dalam suatu BMT atau Koperasi syariah biasanya disebabkan oleh faktor internal (pihak BMT) dan pihak eksternal (anggota yang akan dibiayai). Oleh karena itu dibutuhkan usaha untuk mencegah pembiayaan bermasalah. Salah satu usaha yang dapat diterapkan adalah Manajemen Koperasi dengan menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif dan efisien dalam kegiatan berjalannya pembiayaan, kondisi ini lebih dikhususkan pada persetujuan pembiayaan.

KSPPS Inti Muamalat merupakan salah satu koperasi yang menyediakan jasa pembiayaan syariah. Pada dasarnya prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan KSPPS Inti Muamalat sama dengan pembiayaan yang disalurkan oleh Bank/Koperasi Syariah lainnya. Dalam prakteknya sama seperti koperasi lain

dalam pembiayaan KSPPS Inti juga mengalami kondisi yang pembiayaan bermasalah. Berikut adalah data pembiayaan bermasalah :

Table 1.1. Data Pembiayaan Kredit Bermasalah

No	Bulan Terlambat	Piutang Des 15		Piutang Des 16		Piutang Des 17	
		Rp	%	Rp	%	RP	%
1.	Lancar	14.235.151	94.2	15.023.	96	14.446.	96.
		.974		390.642		789.442	2
2.	Kurang Lancar	170.664.45	1.15	203.177	1.30	320158.	2.1
		0		.000		450	7
3.	Diragukan	158.834.95	1.07	289.694	1.85	75.485.	0.5
		0		.950		300	
4.	Macet	227.160.05	1.54	125.480	0.80	163.388	1.1
		0		.150		.550	1
Jumlah		14.791.611	100	15.647.	100	14.775.	100
		.424		742.742		107.742	
Jumlah Anggota yang dibiayai		2279 orang		2407 orang		2242 orang	

Untuk itu Koperasi Syariah harus lebih meningkatkan prinsip kehati – hatian dalam memberikan keputusan persetujuan pembiayaan murabahah. Atas dasar tersebut maka dilakukan pengamatan tentang aktifitas pengendalian intern terhadap keputusan persetujuan pembiayaan murabahah yang ada pada KSPPS Inti Muamalat Bandung, dan hasil pengamatan tersebut disusun dalam sebuah laporan Tugas Akhir yang berjudul :

“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN IMPLEMENTASI TERHADAP KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI KSPPS INTI MUAMALAT BANDUNGAN”

1.1. Rumusan Masalah

1. Bagaiman Sistem Pengendalian Intern dan implementasi pada Pembiayaan Murabahah d KSPSS Inti Muamalat Bandungan?
2. Apa yang menjadi bahan pertimbangan KSPSS Inti Muamalat Bandungan untuk menyetujui pembiayaan murabahah?

1.3. Tujuan Peneliitian

1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern dan implementasinya dalam Pembiayaan akad Murabahah pada KSPSS Inti Mumalat Bandungan.
2. Untuk mengetahui apa saja bahan pertimbangan KSPSS Inti Mumalat dalam menyeujui pembiayaan murabahah.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penulisan ini bermanfaat untuk mengetahui Sistem Pengendalian Intern di KSPSS Inti Muamalat Bandungan. Harapannya peneliitian ini dapat memeberikan ide serta masukan dalam peningkatan koperasi yang bersangkutan.

b. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mejadi bahan pertimbangan lembaga keuangan mikro lain dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan agar kedepannya dapat mengurangi hal ini terjadi.